

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsistensi Anggaran RKPD Tahun 2018 dengan RPJMD Tahun 2013-2018 (Studi Anggaran Belanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) berdasarkan analisis MKPP didapatkan tingkat konsistensi sebesar 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) dalam kategori baik, walaupun jauh dari angka 100%. Dapat RKPD Tahun 2018 tidak konsisten dengan RPJMD Tahun 2013-2018. Inkonsistensi ini terjadi pada 3 (tiga) program prioritas dari 4 (empat) program prioritas yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi inkonsistensi yaitu perubahan indikator program atau perubahan jumlah sasaran, perubahan pasar, sumber pendanaan yang tidak tepat waktu, dan masukan-masukan dari pemangku kepentingan. Selain itu juga dilihat dari dimensi *output*, anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan juga tidak transparan karena tidak memberikan akses pada publik, hanya RKPD Tahun 2018, RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi Sumatera Selatan dan Renja Bappeda Provinsi Sumsel yang dapat diakses, Sedangkan dokumen RKA dan PPAS yang merupakan dokumen penganggaran dari RKPD tidak dapat diakses. Dari hal tersebut dapat disimpulkan juga bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akuntabel pada lembaga yang berwenang, namun tidak pada masyarakat mengenai perencanaan dan penganggaran yang disusun.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan interpretasi data, serta kesimpulan yang dibuat penulis penelitian yang berjudul Analisis Konsistensi Anggaran RKPD Tahun 2018 dengan

RPJMD Tahun 2013-2018 (Studi Anggaran Belanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Penulis dapat memberikan beberapa saran guna dapat meningkatkan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan indikator program dan sasaran program sebaiknya harus benar-benar tepat perhitungannya. Dan sebelum menetapkan anggaran juga harus melihat pasar karena pasar cepat mengalami perubahan. Dan usulan dari pemangku kepentingan dalam forum yang tidak sesuai prioritas program dan tidak sesuai kepentingan masyarakat, tidak seharusnya asal diterima. Sehingga anggaran yang seharusnya tidak perlu berubah menjadi berubah karena kepentingan golongan semata.
2. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan harus transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan memberikan akses pada publik agar dapat memantau. Sehingga tidak terdapat penyalahgunaan dalam proses tersebut.